

Kesenjangan Antara Perencanaan Dan Implementasi Program Pemerintah Daerah: Review Literatur Tentang Lemahnya Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Kinerja

Muhammad Al Habib¹, Sufian Hamim², Raden Imam Al Hafis³

Universitas Islam Riau, Kota, Indonesia

Email : alhabib1605@gmail.com

Published: July , 2026

ABSTRACT

The gap between planning and implementation remains a critical issue in local government program management. Many regional agencies already have planning documents, performance indicators, reporting systems, and evaluation mechanisms, yet these instruments do not always ensure that programs are implemented according to targets and produce measurable results. This article aims to analyze the pattern of gaps between planning and implementation of local government programs by positioning performance based monitoring and evaluation as the critical point. This study uses a literature review method involving 20 scientific articles and a document review of 2 official documents from the Office of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Riau Province. The analysis classifies findings into several themes, namely performance planning, program implementation, organizational capacity, reporting systems, digitalization, and performance evaluation. The findings show that program gaps are not only caused by weak planning, but also by limited human resource capacity, weak coordination, fragmented performance data, and evaluation practices that remain largely administrative. Monitoring and evaluation have not fully functioned as mechanisms for correction, organizational learning, and program control. This article concludes that improving local government program implementation requires stronger outcome indicators, integrated data, tiered monitoring, substantive internal evaluation, and the use of evaluation results as a basis for program improvement.

Keywords: local planning; performance accountability; performance monitoring; program evaluation; program implementation

ABSTRAK

Kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program masih menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Banyak perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan, indikator kinerja, sistem pelaporan, dan mekanisme evaluasi, tetapi keberadaan instrumen tersebut belum selalu mampu memastikan bahwa program berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan dampak yang terukur. Artikel ini bertujuan menganalisis pola kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah dengan menempatkan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagai titik kritis. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur terhadap 20 artikel ilmiah dan telaah terhadap 2 dokumen resmi Disperindagkop UKM Provinsi Riau. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema perencanaan kinerja, implementasi program, kapasitas organisasi, sistem pelaporan, digitalisasi, dan evaluasi kinerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan program tidak hanya disebabkan oleh lemahnya perencanaan, tetapi juga oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang belum kuat, data kinerja yang belum terintegrasi, serta evaluasi yang masih cenderung administratif. Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, pembelajaran, dan pengendalian program. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbaikan implementasi program pemerintah daerah memerlukan penguatan indikator hasil, integrasi data, pemantauan berjenjang, evaluasi internal yang substantif, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program.

Kata kunci: akuntabilitas kinerja; evaluasi program; implementasi program; monitoring kinerja; perencanaan daerah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Program pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari seberapa lengkap dokumen perencanaannya, tetapi dari sejauh mana rencana tersebut benar benar bergerak menjadi kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik administrasi publik, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi seharusnya bekerja sebagai satu siklus manajemen kinerja. Rencana menetapkan arah, implementasi menguji kemampuan organisasi menjalankan program, sedangkan monitoring dan evaluasi memastikan pelaksanaan tidak berjalan sekadar mengikuti rutinitas

anggaran. Masalah muncul ketika siklus tersebut terputus. Pemerintah daerah dapat memiliki Renstra, Renja, indikator, laporan kinerja, serta aplikasi pelaporan, tetapi program yang dilaksanakan belum tentu menjawab sasaran secara nyata.

Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, isu tersebut berkaitan erat dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. SAKIP pada dasarnya dimaksudkan untuk menghubungkan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja dalam satu sistem pertanggungjawaban. Lestari dan Salomo (2022) menjelaskan bahwa manajemen kinerja mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan hasil kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, kajian mereka juga menunjukkan bahwa kendala implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah banyak terletak pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Dengan demikian, persoalan SAKIP bukan hanya soal keberadaan sistem, melainkan soal kemampuan organisasi menggunakan sistem tersebut sebagai alat kendali kinerja.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa reformasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya bergerak dari kepatuhan administratif menuju budaya kinerja. Salomo dan Rahmayanti (2023) menemukan bahwa perbaikan SAKIP pemerintah daerah memang terjadi, tetapi prosesnya lambat dan masih didominasi formalisme. Temuan tersebut penting karena menjelaskan mengapa banyak pemerintah daerah mampu menyusun dokumen kinerja, tetapi belum selalu mampu menjadikan dokumen itu sebagai alat koreksi pelaksanaan program. Panggalih dan Bastian (2024) juga menunjukkan bahwa praktik terbaik akuntabilitas kinerja memerlukan ukuran keberhasilan yang jelas, konsistensi dokumen, evaluasi, serta dukungan manajerial. Artinya, sistem kinerja baru bermakna jika setiap tahapnya saling terhubung, bukan berdiri sebagai kewajiban administratif yang terpisah.

Kesenjangan antara perencanaan dan implementasi semakin terlihat ketika program pemerintah daerah menghadapi persoalan kapasitas pelaksana, koordinasi, komunikasi, dan pemahaman terhadap sasaran. Darmawaty dkk. (2020) menemukan bahwa implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Depok belum mencapai target karena pelaksana belum memahami secara tepat substansi tugas, ukuran, sasaran, dan tujuan program. Nani dkk. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas SAKIP di Kabupaten Sumba Timur belum optimal karena target dan ketepatan waktu belum terpenuhi, sosialisasi lemah, respons perangkat daerah rendah, serta pemanfaatan teknologi informasi belum berjalan. Latif dkk. (2022) bahkan menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja dapat terjebak pada pemenuhan dokumen, sementara kualitas substansi dokumen belum digarap secara mendalam. Pola ini menunjukkan bahwa masalah implementasi tidak selalu berada pada ketiadaan rencana, tetapi pada lemahnya pengawalan rencana dalam proses kerja organisasi.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan prioritas program. Suwanda dkk. (2021) menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja seharusnya mengaitkan pendanaan dengan hasil program yang ingin dicapai, sedangkan prinsip *money follow program* mengarahkan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun, hubungan ini sering tidak berjalan kuat jika indikator kinerja hanya menjadi pelengkap dokumen, bukan dasar pengambilan keputusan. Ketika anggaran tidak dibaca melalui capaian hasil, maka program berisiko berjalan berdasarkan rutinitas kegiatan. Akibatnya, realisasi anggaran dapat terlihat baik, tetapi keberhasilan program belum tentu tergambar melalui perubahan kinerja yang substansial.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan sering dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menutup gap antara rencana dan implementasi. Apriliani dkk. (2023) menemukan bahwa *e planning* dan *e budgeting* tidak berpengaruh terhadap SAKIP, sedangkan *e procurement* berpengaruh positif. Gitasih dkk. (2023) menunjukkan bahwa E SAKIP berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, tetapi tetap membutuhkan pelatihan agar pemahaman dan penggunaan aplikasi meningkat. Ria dan Harvianto (2023) juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan elektronik dapat mempercepat pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kinerja. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat membantu, tetapi efektivitasnya bergantung pada integrasi data, kualitas indikator, kapasitas pengguna, dan komitmen organisasi.

Monitoring dan evaluasi menjadi titik kritis karena keduanya menentukan apakah penyimpangan implementasi dapat dikenali lebih awal dan diperbaiki. Akanbang (2024) menemukan bahwa sistem monitoring pemerintah lokal di Ghana dapat kuat pada tahap desain, tetapi lemah pada implementasi dan

refleksi. Mabizela dan Zwane (2023) juga menempatkan monitoring dan evaluasi sebagai pendekatan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah lokal, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan sistem penilaian. Eresia Eke dan Boadu (2019) menambahkan bahwa kesiapan monitoring dan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas pendukung dan respons organisasi terhadap informasi negatif. Dalam konteks ini, evaluasi yang baik bukan hanya mencatat capaian, melainkan memaksa organisasi membaca kegagalan secara jujur.

Konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau relevan untuk dibaca melalui kerangka tersebut. Renstra Perubahan 2019 sampai 2024 Disperindagkop UKM Provinsi Riau menegaskan bahwa dokumen strategis disusun untuk menyinergikan arah kebijakan, program, indikator, serta menjadi pedoman pengendalian, monitoring, dan evaluasi program yang berorientasi pada *output*, *outcome*, dan *impact* (Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2022). Sementara itu, LKjIP 2024 menunjukkan bahwa laporan kinerja digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah (Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2025). Dua dokumen ini memperlihatkan bahwa secara formal perangkat perencanaan dan akuntabilitas sudah tersedia. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana instrumen tersebut benar benar dipakai untuk mengoreksi pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari masalah utama bahwa kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah tidak cukup dijelaskan melalui lemahnya dokumen perencanaan. Gap tersebut lebih tepat dipahami sebagai lemahnya hubungan antara rencana, indikator, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membaca monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagai titik penghubung antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah. Proposisi yang diajukan adalah bahwa semakin lemah fungsi monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme koreksi, semakin besar peluang program pemerintah daerah berjalan administratif tanpa menghasilkan perbaikan kinerja yang nyata. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis pola kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor penyebab lemahnya monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta mengaitkan temuan literatur tersebut dengan konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tinjauan literatur integratif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menyusun pemahaman konseptual tentang mengapa kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah masih terjadi. Tinjauan literatur digunakan untuk membaca pola temuan dari berbagai penelitian terdahulu, sedangkan telaah dokumen digunakan untuk mengaitkan hasil sintesis tersebut dengan konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau.

Sumber data penelitian terdiri atas 20 artikel ilmiah dan 2 dokumen resmi pemerintah daerah. Artikel ilmiah yang digunakan membahas tema akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, SAKIP, implementasi kebijakan, penganggaran berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi, digitalisasi pelaporan, serta evaluasi pelayanan publik. Dua dokumen resmi yang digunakan adalah Renstra Perubahan Disperindagkop UKM Provinsi Riau Tahun 2019 sampai 2024 dan LKjIP Disperindagkop UKM Provinsi Riau Tahun 2024. Renstra digunakan untuk membaca arah perencanaan, tujuan, sasaran, program, indikator, dan orientasi monitoring evaluasi. LKjIP digunakan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan, capaian kinerja, serta ruang perbaikan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pemilihan literatur dilakukan dengan beberapa kriteria. Pertama, sumber harus tersedia dalam bentuk PDF sehingga dapat diperiksa isi, metode, dan temuannya secara langsung. Kedua, artikel terbit dalam rentang 2019 sampai 2025 agar sesuai dengan kebutuhan rujukan mutakhir. Ketiga, artikel harus relevan dengan sekurang kurangnya satu dari lima tema utama, yaitu perencanaan kinerja, implementasi program, akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi, atau sistem pelaporan kinerja. Keempat, artikel harus membahas sektor publik, pemerintah daerah, atau organisasi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan siklus program. Dengan kriteria tersebut, artikel yang tidak berhubungan dengan program

pemerintah daerah, tidak membahas kinerja sektor publik, atau tidak memiliki akses dokumen penuh tidak digunakan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi isi setiap sumber, meliputi judul, penulis, tahun, metode, objek, dan temuan utama. Tahap kedua adalah klasifikasi temuan ke dalam tema besar, yaitu perencanaan kinerja, hambatan implementasi, kapasitas organisasi, kualitas data, digitalisasi sistem kinerja, dan fungsi monitoring evaluasi. Tahap ketiga adalah sintesis tematik untuk menemukan pola yang berulang dalam literatur, terutama pola formalisme dokumen, lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya data kinerja, serta belum kuatnya tindak lanjut hasil evaluasi. Tahap keempat adalah pengaitan temuan literatur dengan dokumen Disperindagkop UKM Provinsi Riau untuk melihat relevansi isu tersebut dalam konteks perangkat daerah.

Validitas kajian dijaga dengan cara membandingkan temuan antarartikel dan menghindari penggunaan sumber yang tidak masuk dalam daftar rujukan utama. Setiap sumber yang digunakan dalam pembahasan akan dimasukkan ke dalam bodynote dan daftar pustaka. Dengan cara ini, analisis tidak hanya bertumpu pada ringkasan normatif, tetapi pada sintesis dari sumber yang telah diperiksa secara langsung.

TEMUAN DAN DISKUSI

Pemetaan Literatur tentang Perencanaan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemerintah Daerah

Bagian ini menyajikan hasil pemetaan terhadap 20 artikel ilmiah dan 2 dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar analisis. Pemetaan dilakukan untuk melihat metode, temuan utama, persamaan, dan perbedaan setiap sumber dengan fokus artikel ini. Dengan cara ini, pembahasan tidak hanya dibangun dari uraian konseptual, tetapi dari pola temuan penelitian terdahulu yang telah diklasifikasikan secara sistematis.

Tabel 1. Review Literatur dan Dokumen Pendukung

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akanbang, 2024, <i>Local Government Monitoring System's Design and Implementation in Ghana from the Lens of the Project Life Cycle</i> , SAGE Open	Survei kuantitatif deskriptif	Desain monitoring kuat, tetapi implementasi dan refleksi masih lemah.	Sama sama membahas monitoring pemerintah lokal.	Fokus pada Ghana, bukan Indonesia.
2	Mabizela dan Zwane, 2023, <i>Monitoring and Evaluation as Critical Approach to Enhance the Performance of Local Government</i> , International Journal of Research in Business and Social Science, 12(7)	Kualitatif	M&E penting untuk kinerja lokal, tetapi terkendala sumber daya, kapasitas, dan pelembagaan.	Sama sama menempatkan M&E sebagai alat kinerja.	Fokus pada Afrika Selatan.
3	Eresia Eke dan Boadu, 2019, <i>Monitoring and Evaluation Preparedness of Public Sector Institutions in South Africa</i> , Journal of Reviews on Global Economics, 8	Kualitatif	Kesiapan M&E belum merata karena kapasitas pendukung dan respons organisasi masih lemah.	Sama sama membahas kesiapan M&E.	Fokus pada institusi publik Afrika Selatan.
4	Salomo dan Rahmayanti, 2023, <i>Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia</i> , SAGE Open	Metode campuran	Reformasi meningkat, lambat dan formalistik.	SAKIP tetapi masih formalistik.	Sama sama membahas akuntabilitas pemerintah daerah.
5	Lestari dan Salomo, 2022, <i>Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada</i>	Tinjauan literatur	Hambatan utama berada pada kualitas SDM dan kapasitas organisasi.	Sama sama berbasis review literatur.	Tidak secara khusus menyoroti gap perencanaan dan implementasi.

6	Panggalih dan Bastian, 2024, <i>Design of Government Agency's Performance Accountability System Best Practice Implementation</i> , Journal of Accounting and Investment, 25(2)	Kualitatif studi kasus	Praktik terbaik SAKIP membutuhkan konsistensi dokumen, indikator, evaluasi, dan dukungan manajemen.	Sama membahas penguatan SAKIP.	sama	Fokus pada model praktik terbaik.
7	Setianto, Ningrum, dan Muhafidin, 2021, <i>Implementation of Government Performance Accountability System SAKIP in Indonesian Local Government</i> , Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1)	Kualitatif studi kasus	Struktur organisasi mendukung SAKIP, tetapi perencanaan, evaluasi, dan strategi kinerja masih bermasalah.	Sama membahas daerah.	sama SAKIP	Fokus pada Bappeda Sukabumi.
8	Darmawaty, Jeddawi, dan Lukman, 2020, <i>Implementasi Kebijakan SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Depok</i> , Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1)	Kualitatif deskriptif	Implementasi belum mencapai target karena pemahaman pelaksana, SDM, anggaran, komunikasi, dan koordinasi lemah.	Sama membahas hambatan implementasi.	sama	Fokus pada Setda Kota Depok.
9	Nani, Rowa, dan Martini, 2021, <i>Efektivitas SAKIP di Kabupaten Sumba Timur</i> , Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(1)	Kualitatif deskriptif	SAKIP belum efektif karena target, sosialisasi, respons perangkat daerah, TI, dan kapasitas SDM belum optimal.	Sama membahas efektivitas SAKIP.	sama	Fokus pada Kabupaten Sumba Timur.
10	Latif, Asri, dan Santosa, 2022, <i>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Paser</i> , Journal Publicuho, 5(4)	Kualitatif deskriptif	Akuntabilitas masih berorientasi dokumen, belum menyentuh kualitas substansi.	Sama mengkritik formalisme dokumen.	sama	Fokus pada Kabupaten Paser.
11	Mulyana, 2020, <i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</i> , artikel ilmiah	Kualitatif studi kasus	Predikat AKIP belum mencapai target karena pengukuran, pelaporan, dan evaluasi belum optimal.	Sama membahas akuntabilitas kinerja.	sama evaluasi	Fokus pada Pemprov DKI Jakarta.
12	Dewata, Sari, Jauhari, dan Lestari, 2020, <i>Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i> , Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(3)	Kuantitatif regresi	Ketaatan regulasi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.	Sama membahas pelaporan kinerja.	sama	Fokus pada pengaruh variabel kuantitatif.
13	Apriliani, Dirgantari, Hariyanto, dan Wibowo, 2023, <i>Pengaruh E Planning, E Budgeting, dan E Procurement terhadap SAKIP</i> , Owner, 7(1)	Kuantitatif regresi	E Planning dan E Budgeting tidak berpengaruh, sedangkan E Procurement berpengaruh positif terhadap SAKIP.	Sama membahas elektronik SAKIP.	sama sistem dan	Fokus pada data kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
14	Gitasih, Sumada, dan Astawa, 2023, <i>Pengaruh E SAKIP terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung</i> , Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 6(4)	Kuantitatif kuesioner	E SAKIP berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, tetapi perlu pelatihan pengguna.	Sama membahas digitalisasi kinerja.	sama	Fokus pada Kabupaten Badung.
15	Ria dan Harvianto, 2023, <i>Peran Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik dalam Pelaporan Kinerja</i>	Kualitatif deskriptif	E Pelaporan mempercepat pengumpulan,	Sama membahas elektronik.	sama M&E	Fokus pada LIPI, bukan pemerintah daerah.

	<i>Organisasi di LIPI, Monas, 5(1)</i>		verifikasi, dan validasi data capaian kinerja.			
16	Hapsari, Wirjatmi, dan Gedeona, 2023, <i>Optimalisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Balitbangda Provinsi Jawa Barat</i> , Jurnal Media Administrasi Terapan, 4(1)	Kualitatif dengan SSM dan CATWOE	Monev masih menekankan proses, capaian kinerja, dan serapan anggaran.	Sama sama membahas kelemahan monev.		Fokus pada hasil kelitbangan.
17	Nashihah, Rachman, Binada, Nastiti, dan Yulitasari, 2023, <i>Strategi Peningkatan SAKIP Kota Malang</i> , Jurnal Pangripta, 6(1)	Kualitatif deskriptif	Peningkatan SAKIP perlu SOP, survei kepuasan, koordinasi, pengaduan, dan inovasi layanan.	Sama sama membahas strategi akuntabilitas.		Fokus pada Kota Malang.
18	Sihombing, Sihombing, dan Kusmanto, 2025, <i>Analisis Strategi Penguatan PEKPPP</i> , Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 7(2)	Kualitatif deskriptif	Kelemahan utama ada pada sistem informasi, pengaduan, inovasi, SDM, data, dan partisipasi publik.	Sama sama membahas evaluasi kinerja pelayanan publik.		Fokus pada RSUD HAMS Asahan.
19	Suwanda, Moenek, Lukman, dan Syaifullah, 2021, <i>The Implementation of Performance Based Budgeting Through A Money Follow Program</i> , JIUBJ, 21(2)	Kualitatif deskriptif	Penganggaran berbasis kinerja menghubungkan pendanaan dengan hasil program.	Sama sama membahas hubungan program dan kinerja.		Fokus pada penganggaran berbasis kinerja.
20	Haryani, 2019, <i>Evaluasi Implementasi SAKIP di Biro Hukum Pemprov Kepulauan Riau</i> , Bangkit Indonesia, 8(1)	Studi literatur dan wawancara	SAKIP membantu rencana kerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pembangunan daerah.	Sama sama membahas evaluasi SAKIP provinsi.		Menunjukkan kasus implementasi yang relatif baik.
21	Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2022, <i>Renstra Perubahan 2019 sampai 2024</i>	Telaah dokumen resmi	Renstra menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi berbasis hasil.	Menjadi konteks perencanaan Disperindagkop UKM Riau.		Bukan artikel jurnal.
22	Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2025, <i>LKjIP Tahun 2024</i>	Telaah dokumen resmi	LKjIP memuat capaian kinerja, tindak lanjut evaluasi, serta ruang perbaikan akuntabilitas.	Menjadi konteks evaluasi kinerja Disperindagkop UKM Riau.		Bukan artikel jurnal.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar penelitian terdahulu membahas SAKIP, akuntabilitas, sistem pelaporan, digitalisasi, penganggaran berbasis kinerja, dan monitoring evaluasi secara terpisah. Artikel ini mengambil posisi berbeda dengan membaca seluruh temuan tersebut sebagai satu siklus program pemerintah daerah. Kesenjangan perencanaan dan implementasi tidak dipahami sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai akibat dari hubungan yang lemah antara dokumen rencana, indikator, anggaran, kapasitas pelaksana, data kinerja, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Karena itu, fokus artikel ini ditempatkan pada lemahnya monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagai titik putus yang membuat rencana program tidak selalu berubah menjadi hasil program yang terukur.

Perencanaan Kinerja yang Kuat secara Dokumen, tetapi Rentan Formalistik

Pemetaan literatur menunjukkan bahwa perencanaan kinerja pemerintah daerah umumnya tidak lagi berada pada tahap ketiadaan dokumen. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dokumen perencanaan, indikator, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan sistem akuntabilitas. Masalahnya terletak pada apakah dokumen tersebut benar benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lestari dan Salomo (2022) menegaskan bahwa manajemen kinerja mencakup perencanaan, pengukuran, dan pelaporan sebagai dasar keputusan organisasi. Namun, hambatan utama implementasinya masih berada pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi.

Risiko formalisme terlihat ketika dokumen perencanaan disusun untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk mengarahkan kerja program. Salomo dan Rahmayanti (2023) menunjukkan bahwa reformasi SAKIP pemerintah daerah memang mengalami kemajuan, tetapi prosesnya lambat dan masih didominasi

formalisme. Dalam situasi ini, indikator dan target dapat tertulis rapi, tetapi belum tentu menjadi alat untuk memilih prioritas, mengalokasikan anggaran, dan mengoreksi pelaksanaan program.

Panggali dan Bastian (2024) memberi perbandingan bahwa praktik terbaik SAKIP membutuhkan konsistensi dokumen, ukuran keberhasilan yang jelas, validasi data, evaluasi berkala, dan dukungan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan baru bermakna jika terhubung dengan pengukuran dan tindak lanjut. Suwanda dkk. (2021) juga menekankan bahwa penganggaran berbasis kinerja harus menghubungkan pendanaan dengan hasil program, sehingga anggaran mengikuti prioritas yang berdampak.

Dalam konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Renstra Perubahan 2019 sampai 2024 telah menempatkan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program. Namun, sebagaimana pola dalam literatur, tantangan utamanya bukan sekadar menyusun rencana, melainkan memastikan rencana tersebut menjadi alat kendali implementasi. Dengan demikian, gap perencanaan dan implementasi mulai muncul ketika dokumen lebih kuat sebagai bukti administratif daripada sebagai instrumen manajemen kinerja.

Hambatan Implementasi Program: Kapasitas SDM, Koordinasi, dan Komitmen Organisasi

Tahap implementasi menjadi ruang paling nyata untuk melihat apakah perencanaan program benar benar bekerja. Literatur menunjukkan bahwa banyak hambatan implementasi tidak bersumber dari ketiadaan aturan, tetapi dari lemahnya kapasitas organisasi dalam menerjemahkan rencana menjadi tindakan. Darmawaty dkk. (2020) menemukan bahwa implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Depok belum mencapai target karena pelaksana belum memahami substansi tugas, ukuran, sasaran, dan tujuan program. Hambatan tersebut diperkuat oleh keterbatasan anggaran, kualitas SDM, komunikasi, koordinasi, kewenangan, dan disiplin pelaksana.

Temuan serupa terlihat pada Nani dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa SAKIP di Kabupaten Sumba Timur belum efektif karena target dan ketepatan waktu belum terpenuhi, sosialisasi belum berjalan baik, respons perangkat daerah rendah, kompetensi penyelenggara terbatas, dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. Latif dkk. (2022) juga menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Paser masih cenderung berorientasi pada pemenuhan dokumen, sementara substansi dokumen belum digarap secara mendalam. Pola ini memperlihatkan bahwa implementasi sering melemah ketika aktor pelaksana lebih fokus memenuhi bukti administratif daripada memastikan hubungan antara kegiatan dan hasil.

Setianto dkk. (2021) menambahkan bahwa struktur organisasi dapat mendukung SAKIP, tetapi masih terdapat persoalan pada penyebaran informasi kebijakan, perencanaan, evaluasi, dan strategi peningkatan kinerja. Artinya, struktur formal tidak cukup jika komunikasi dan koordinasi tidak berjalan. Mulyana (2020) juga menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dengan sumber daya besar tetap dapat menghadapi masalah akuntabilitas ketika pengukuran, pelaporan, dan evaluasi belum digunakan secara optimal.

Dari pola tersebut, hambatan implementasi dapat dipahami dalam tiga lapis. Pertama, lapis individu, berupa keterbatasan pemahaman, kompetensi, dan disiplin pelaksana. Kedua, lapis organisasi, berupa lemahnya koordinasi, komitmen pimpinan, sistem data, dan dukungan sumber daya. Ketiga, lapis manajerial, berupa belum kuatnya hubungan antara indikator, kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Jika tiga lapis ini tidak diperbaiki, rencana program akan tetap terlihat lengkap, tetapi pelaksanaannya mudah bergeser menjadi rutinitas administratif.

Monitoring dan Evaluasi sebagai Titik Putus antara Rencana dan Hasil Program

Monitoring dan evaluasi menjadi titik paling menentukan dalam menjelaskan mengapa rencana program pemerintah daerah tidak selalu berubah menjadi hasil program. Jika perencanaan menyusun arah dan implementasi menjalankan kegiatan, maka monitoring dan evaluasi seharusnya membaca apakah pelaksanaan masih bergerak sesuai sasaran. Masalahnya, banyak praktik evaluasi masih berhenti pada pemeriksaan laporan, capaian kegiatan, dan serapan anggaran. Dalam pola seperti ini, evaluasi belum bekerja sebagai alat koreksi, tetapi lebih sebagai bukti bahwa kewajiban administrasi telah dipenuhi.

Akanbang (2024) menunjukkan bahwa sistem monitoring pemerintah lokal dapat kuat pada tahap desain, tetapi lemah pada tahap implementasi dan refleksi. Temuan ini penting karena memperlihatkan

bahwa sistem yang tampak rapi di atas kertas belum tentu mampu menghasilkan pembelajaran organisasi. Monitoring baru bekerja sebagai instrumen kinerja jika memiliki indikator yang jelas, data yang dapat dipercaya, sumber daya memadai, pelatihan, dukungan kebijakan, dan mekanisme pelaporan yang benar benar digunakan untuk memperbaiki program.

Mabizela dan Zwane (2023) juga menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah lokal, terutama ketika kinerja pelayanan masih rendah. Namun, efektivitasnya bergantung pada pelembagaan evaluasi, kepatuhan pada prosedur, integrasi teknologi informasi, dan pendekatan partisipatif. Eresia Eke dan Boadu (2019) menambahkan bahwa kesiapan evaluasi tidak cukup dilihat dari keberadaan sistem, tetapi juga dari kapasitas pendukung dan respons organisasi terhadap informasi negatif. Ini krusial, karena hasil evaluasi sering berisi temuan yang tidak nyaman, seperti target tidak tercapai, indikator tidak relevan, atau program tidak memberi dampak kuat.

Dalam konteks Indonesia, Hapsari dkk. (2023) menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi di Balitbangda Provinsi Jawa Barat masih banyak menekankan aspek proses, capaian kinerja, dan serapan anggaran. Sihombing dkk. (2025) menemukan kelemahan evaluasi pelayanan publik pada sistem informasi, pengelolaan pengaduan, inovasi, keterbatasan SDM, integrasi data, dan partisipasi publik. Nashihah dkk. (2023) menawarkan arah perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, penguatan SOP, pelibatan masyarakat dalam review program, koordinasi antarperangkat daerah, pengaduan, inovasi, dan sosialisasi evaluasi.

Sintesis dari sumber tersebut menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi berbasis kinerja masih lemah pada tiga aspek. Pertama, data kinerja belum selalu terintegrasi dengan informasi pelaksanaan dan umpan balik masyarakat. Kedua, hasil evaluasi belum selalu menjadi dasar perubahan strategi program. Ketiga, evaluasi belum cukup berani membaca kegagalan secara substantif. Akibatnya, gap perencanaan dan implementasi terus berulang. Program berjalan, laporan dibuat, tetapi organisasi tidak selalu belajar dari deviasi pelaksanaan. Di sinilah monitoring dan evaluasi perlu digeser dari sekadar prosedur pelaporan menjadi mekanisme koreksi dan pembelajaran kinerja.

Digitalisasi Sistem Kinerja: Membantu Pelaporan, tetapi Tidak Otomatis Memperbaiki Akuntabilitas

Digitalisasi sistem kinerja sering dipahami sebagai solusi untuk memperbaiki perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pemerintah daerah. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, karena aplikasi dapat mempercepat input data, memudahkan verifikasi, dan membuat informasi kinerja lebih mudah dipantau. Namun, literatur menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis memperbaiki akuntabilitas jika hanya memindahkan prosedur administratif ke dalam sistem elektronik.

Apriliani dkk. (2023) menemukan bahwa *e planning* dan *e budgeting* tidak berpengaruh terhadap SAKIP, sedangkan *e procurement* berpengaruh positif. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem elektronik pada tahap perencanaan dan penganggaran belum tentu meningkatkan akuntabilitas jika tidak disertai integrasi data dan kualitas indikator. Sebaliknya, Gitasih dkk. (2023) menunjukkan bahwa E SAKIP berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, tetapi tetap membutuhkan pelatihan agar pengguna memahami dan memanfaatkan aplikasi secara aktif.

Ria dan Harvianto (2023) memberi contoh bahwa sistem pelaporan elektronik dapat mempercepat pengumpulan, verifikasi, dan validasi data capaian kinerja. Namun, manfaat tersebut muncul ketika sistem dipakai untuk menghubungkan data antarlevel organisasi, bukan sekadar menyimpan laporan. Dewata dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh ketaatan pada regulasi dan kualitas sistem pelaporan. Artinya, aplikasi tetap membutuhkan komitmen pimpinan, koordinasi, disiplin pelaporan, dan budaya penggunaan data.

Dengan demikian, digitalisasi adalah alat pendukung, bukan penyelesaian utama gap perencanaan dan implementasi. Sistem elektronik baru memberi dampak jika data yang masuk valid, indikator relevan, pengguna memahami sistem, dan hasil pelaporan dipakai untuk mengoreksi program.

Relevansi Sintesis Literatur bagi Disperindagkop UKM Provinsi Riau

Sintesis literatur di atas relevan untuk membaca posisi Disperindagkop UKM Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang memiliki siklus perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Renstra Perubahan 2019 sampai 2024 menegaskan bahwa dokumen tersebut disusun untuk menyinergikan strategi, arah

kebijakan, program, dan indikator pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, dan UKM. Renstra juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja, acuan penyusunan laporan kinerja, serta arah pengendalian, monitoring, dan evaluasi program yang berorientasi pada *output*, *outcome*, dan *impact* (Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2022).

LKjIP 2024 menunjukkan bahwa pelaporan kinerja Disperindagkop UKM Provinsi Riau telah dikaitkan dengan pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra, realisasi indikator sasaran, penjelasan keberhasilan dan kegagalan, serta perbandingan capaian indikator kinerja (Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2025). Artinya, secara formal, perangkat akuntabilitas sudah tersedia. Namun, catatan evaluasi dalam LKjIP juga menunjukkan ruang perbaikan. Beberapa target belum sepenuhnya memedomani capaian hasil kinerja tahun sebelumnya. Pada aspek pengukuran kinerja, dinas telah menggunakan aplikasi SIAPADIA sebagai alat monitoring dan evaluasi berkala, tetapi kinerja belum menjadi dasar *reward* dan *punishment*, pemantauan capaian unit di bawahnya belum dilakukan secara berjenjang, serta penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien belum sepenuhnya berjalan (Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, 2025).

Temuan ini sejalan dengan pola besar literatur bahwa gap perencanaan dan implementasi tidak selalu muncul karena ketiadaan dokumen. Gap justru sering muncul ketika informasi kinerja belum dimanfaatkan secara kuat untuk memperbaiki target, strategi, dan pelaksanaan program. Karena itu, konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau memperlihatkan kebutuhan untuk memperkuat monitoring berjenjang, penggunaan data hasil evaluasi, dan tindak lanjut manajerial. Renstra telah memberi arah, sedangkan LKjIP telah menyediakan informasi pertanggungjawaban. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa informasi tersebut benar benar menjadi dasar koreksi program, bukan hanya laporan tahunan.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah tidak semata mata disebabkan oleh lemahnya dokumen perencanaan. Banyak pemerintah daerah telah memiliki dokumen strategis, indikator, sistem pelaporan, dan aplikasi pendukung. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada lemahnya hubungan antara rencana, indikator, anggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Ketika hubungan ini tidak bekerja sebagai satu siklus manajemen kinerja, program tetap dapat berjalan secara administratif, tetapi belum tentu menghasilkan capaian yang sesuai dengan sasaran publik.

Temuan utama artikel ini menunjukkan lima hal. Pertama, perencanaan kinerja pemerintah daerah sering kuat secara dokumen, tetapi rentan formalistik jika indikator dan target tidak menjadi dasar keputusan program. Kedua, implementasi program banyak terhambat oleh kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, komunikasi, komitmen pimpinan, serta sistem data yang belum kuat. Ketiga, monitoring dan evaluasi masih sering diposisikan sebagai kegiatan pelaporan, bukan mekanisme koreksi terhadap deviasi pelaksanaan program. Keempat, digitalisasi sistem kinerja dapat membantu pelaporan dan validasi data, tetapi tidak otomatis memperbaiki akuntabilitas jika tidak didukung kualitas indikator, integrasi data, dan budaya penggunaan informasi kinerja. Kelima, konteks Disperindagkop UKM Provinsi Riau menunjukkan bahwa perangkat perencanaan dan pelaporan sudah tersedia, tetapi penguatan masih diperlukan pada pemanfaatan hasil evaluasi, monitoring berjenjang, dan tindak lanjut manajerial.

Keterbatasan artikel ini terletak pada desain kajiannya yang berbasis tinjauan literatur dan telaah dokumen. Artikel ini belum menggunakan wawancara langsung, observasi lapangan, atau pengujian empiris terhadap pelaksana program di Disperindagkop UKM Provinsi Riau. Karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat sintesis konseptual dan aplikatif, bukan generalisasi empiris penuh.

Rekomendasi utama artikel ini adalah perlunya memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagai mekanisme pembelajaran organisasi. Pemerintah daerah perlu menyusun indikator hasil yang lebih tajam, mengintegrasikan data kinerja, memperkuat pemantauan berjenjang, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyesuaian target dan strategi, serta menghubungkan capaian kinerja dengan sistem penghargaan dan konsekuensi organisasi. Dengan cara tersebut, monitoring dan evaluasi tidak lagi berhenti sebagai kewajiban pelaporan, tetapi menjadi alat koreksi agar perencanaan program benar benar terhubung dengan hasil yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akanbang, B. A. A. (2024). Local government monitoring system's design and implementation in Ghana from the lens of the project life cycle. *SAGE Open*, 14(4), 1–18. <https://doi.org/10.1177/21582440241293884>
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 254–263. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Darmawaty, Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 130–143.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541–550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342>
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. (2022). *Renstra perubahan 2019–2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau*.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. (2025). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2024*.
- Eresia-Eke, C. E., & Boadu, E. S. (2019). Monitoring and evaluation preparedness of public sector institutions in South Africa. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 532–542.
- Gitasih, N. K. Y., Sumada, I. M., & Astawa, I. W. (2023). Pengaruh e-SAKIP terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 1057–1064.
- Hapsari, N. W., Wirjatmi, E., & Gedeona, H. T. (2023). Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 4(1), 19–25.
- Haryani, D. S. (2019). Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Bangkit Indonesia*, 8(1), 19–25.
- Latif, H., Asri, S., & Santosa, A. (2022). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Paser. *Journal Publicho*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal MODERAT*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Mabizela, H., & Zwane, Z. (2023). Monitoring and evaluation as critical approach to enhance the performance of local government: South Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(7), 74–84. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i7.2746>
- Mulyana, B. (2020). *Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 102–111.
- Nashihah, D., Rachman, R. A., Binada, U., Nastiti, B., & Yulitasari, L. D. (2023). Strategi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Malang. *Jurnal Pangripta*, 6(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.173>
- Panggalih, F. H., & Bastian, I. (2024). Design of government agency's performance accountability system best practice implementation: Indonesia experience. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 498–525. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20021>
- Ria, M. D., & Harvianto, F. (2023). Peran sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-pelaporan) dalam pelaporan kinerja organisasi di LIPI tahun 2018–2020. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 5(1), 30–43.
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local governments performance accountability system reform in Indonesia. *SAGE Open*, 13(4), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>

- Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of government performance accountability system (SAKIP) in Indonesian local government: Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 61–78. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>
- Sihombing, P. N., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2025). Analisis strategi penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 7(2), 24–47.
- Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The implementation of performance-based budgeting through a money follow program in impressing budget corruption. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 871–878. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1576>